

The Role of Digital Technology Literacy and Auditor Independence in Improving Fraud Prevention Effectiveness: A Study at BPR Delta Artha Sidoarjo

[Peran Literasi Teknologi Digital dan Independensi Auditor Dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud : Studi Pada BPR Delta Artha Sidoarjo]

Sevina Surya Anggraini¹⁾, Ruci Arizanda Rahayu²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ruci_rahayu@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the role of digital technology literacy and auditor independence in improving fraud prevention effectiveness at BPR Delta Artha Sidoarjo. The study uses a qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants include the administrative department, compliance department, internal auditors, and external auditors from a Public Accounting Firm (PAF). The findings show that digital technology, especially the Core Banking System (CBS), supports recording, reporting, and data access. However, its use is still limited to administrative purposes and has not been optimized for early fraud detection. Auditor independence has been implemented formally, but its effectiveness is still limited by organizational structure and periodic audits. Therefore, auditors mainly play an evaluative rather than preventive role. The study concludes that improving human resource competence, optimizing digital technology, and strengthening auditor independence are important to enhance fraud prevention effectiveness.*

Keywords - Digital Technology Literacy, Auditor Independence, Fraud Prevention, Internal Audit.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi teknologi digital dan independensi auditor dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud di BPR Delta Artha Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari bagian administrasi, bagian kepatuhan, auditor internal, serta auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, khususnya Core Banking System (CBS), telah mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan akses data. Namun, pemanfaatannya masih terbatas pada fungsi administratif dan belum optimal dalam mendukung deteksi dini fraud. Independensi auditor telah diterapkan secara formal, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh struktur organisasi dan pelaksanaan audit yang bersifat periodik, sehingga auditor lebih banyak berperan sebagai evaluator dibandingkan pencegah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan independensi auditor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan fraud.

Kata Kunci - Literasi Teknologi Digital, Independensi Auditor, Pencegahan Fraud, Audit Internal.

I. PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan termasuk dalam perilaku ilegal, ditandai oleh adanya tipuan atau manipulasi[1]. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Istilah *fraud* merujuk pada tindakan penipuan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan maksud untuk meraih keuntungan pribadi atau golongan, sambil merugikan pihak lain[2]. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyembunyikan informasi, melakukan penipuan secara langsung, hingga penyalahgunaan aset. Tindakan ini bisa muncul di beragam sektor, mulai dari bisnis, keuangan, hingga pelayanan publik, sehingga menimbulkan dampak negatif yang cukup besar. Hingga kini, praktik *fraud* masih banyak terjadi sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut[3]. Penerapan sistem pengawasan yang kuat menjadi krusial dalam menekan peluang terjadinya kecurangan. Dengan adanya prosedur yang terstruktur dan pengawasan yang ketat, organisasi dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud*

dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor audit dan perbankan. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana layanan diberikan kepada nasabah, tetapi juga metode pengawasan dan pelaporan keuangan dilakukan[4]. Saat ini, audit memiliki peran penting dalam mengevaluasi serta meningkatkan pengelolaan risiko dan pengawasan internal sehingga menjadi aspek yang relevan dalam menyusun tata kelola perusahaan yang baik di era digital[5]. Seiring berkembangnya teknologi, pendekatan audit tradisional telah beradaptasi dengan memanfaatkan perangkat lunak modern dan analisis data. Inovasi ini memungkinkan auditor melakukan pemeriksaan secara lebih komprehensif dan tepat, mempercepat pelaksanaan proses audit, serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan[6]. Teknologi digital turut mendorong peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Melalui sistem yang terintegrasi, data keuangan dapat diakses secara *real time* sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat[7]. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, ketepatan waktu dalam menyajikan informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di sektor perbankan, digitalisasi membantu mengurangi potensi kesalahan manusia, mempercepat transaksi, dan meningkatkan transparansi. Auditor masa kini diharapkan menggunakan bukti audit dalam format digital karena hampir sebagian besar data disimpan sebagai dokumen elektronik. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan auditor untuk melakukan analisis lebih cepat, mengambil keputusan berbasis data, serta memberikan umpan balik langsung selama proses audit, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan[8].

Perubahan ini menuntut auditor untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Auditor masa kini dituntut memiliki kemampuan teknologi yang baik agar mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital[9]. Cara kerja mereka sudah berubah dengan adanya teknologi seperti *blockchain*, *big data analytics*, *machine learning*, dan *artificial intelligence* (AI) yang membuat proses audit lebih tepat, efisien, dan transparan[10]. Dengan dukungan teknologi, auditor dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan secara lebih cepat dan akurat sehingga meningkatkan efektivitas proses audit.

Selain mampu menerapkan teknologi digital dengan baik, independensi auditor memiliki peran krusial dalam menjaga objektivitas serta integritas proses audit. Auditor yang independen juga mampu menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh tekanan (*pressure*) atau rasionalisasi (*rationalization*) dari pihak internal sehingga dapat memberikan penilaian yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap indikasi kecurangan yang ditemukan[11]. Pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan independensi auditor diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus kecurangan yang telah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* sejak dini.

Meskipun kecurangan (*fraud*) tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, penerapan audit internal yang efektif dapat membantu organisasi mengendalikan risiko terkait kasus tersebut. Audit internal yang dijalankan secara profesional dan sesuai dengan standar audit mampu menghambat peluang terjadinya kecurangan, menjaga kualitas pelaporan keuangan secara berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi atau tindakan korektif apabila ditemukan indikasi penyimpangan[12]. Dengan demikian, sinergi antara teknologi digital, independensi auditor, dan efektivitas audit internal menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem pencegahan *fraud* di lingkungan organisasi[13].

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kecurangan (*fraud*) di sektor keuangan, terutama pada lembaga keuangan mikro, semakin sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran. Praktik *fraud* di dunia perbankan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain penggelapan dana, pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan aset perusahaan aset[14]. Sebagian besar kasus tersebut muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan, serta kurangnya independensi dan integritas auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan *fraud* tidak hanya menjadi tanggung jawab internal satu lembaga, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan[15]. Ketidakefisienan sistem pengawasan serta keterlambatan dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan menurunkan reputasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam audit dan penguatan independensi auditor menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan serta deteksi dini terhadap kecurangan[16]. Dalam era digitalisasi perbankan, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), semakin mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan transaksi[17]. Transformasi digital tersebut mencerminkan tren industri perbankan yang secara konsisten mempercepat pemanfaatan sistem digital guna memenuhi kebutuhan nasabah dan merespons dinamika kompetitif sektor keuangan.

Fenomena serupa juga terjadi pada BPR Delta Artha Sidoarjo, sebuah lembaga keuangan mikro daerah yang tengah menjalankan proses transformasi digital secara bertahap. BPR Delta Artha telah mulai mengimplementasikan sistem digital dalam aktivitas operasional dan pelaporan keuangan sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan[18]. Namun perkembangan digital tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sistem pengawasan internal berbasis teknologi. Kesenjangan ini menandakan bahwa digitalisasi operasional tidak disertai dengan peningkatan efektivitas

pengawasan, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam agar transformasi digital dapat mendukung tata kelola yang lebih kuat dan mencegah risiko operasional[19]. Dinamika digitalisasi menuntut kemampuan audit yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi agar pengawasan tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada aspek independensi auditor, tetapi pada kemampuan sistem pengawasan internal untuk bertransformasi sejalan dengan perubahan proses bisnis digital. Kondisi yang dialami BPR Delta Artha sejalan dengan fenomena yang terjadi pada banyak BPR di Indonesia, di mana transformasi digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengendalian dan audit internal[20]. Situasi ini menjadikan BPR Delta Artha sebagai objek penelitian yang strategis untuk mengkaji bagaimana digitalisasi dapat dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan menjaga akuntabilitas lembaga dalam menghadapi risiko operasional di era digital.

Meskipun pemanfaatan teknologi digital dan independensi auditor terbukti berperan penting dalam mencegah kecurangan, implementasinya pada lembaga keuangan mikro seperti BPR masih menghadapi berbagai kendala. Penerapan teknologi digital di BPR umumnya baru sebatas mendukung aktivitas administratif, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan analisis yang mampu mendeteksi indikasi *fraud* sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital saja tidak cukup efektif apabila tidak disertai dengan integritas dan independensi auditor yang mampu menilai dan menginvestigasi secara objektif[21]. Hasil penelitian lainnya menegaskan bahwa digitalisasi proses audit mampu meningkatkan transparansi dan keandalan pelaporan keuangan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat independensi auditor dalam menjalankan tugasnya[22].

Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian internal pada BPR Delta Artha Sidoarjo telah berjalan dengan baik[23], sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada salah satu aspek saja tanpa menelaah bagaimana kedua aspek tersebut berinteraksi dalam proses pencegahan *fraud*. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih banyak mengkaji bank umum berskala besar sedangkan studi yang menyoroti lembaga keuangan mikro seperti BPR masih terbatas. Padahal, BPR memiliki karakteristik unik dalam hal sumber daya manusia, sistem pengawasan internal, dan struktur organisasi, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas auditor serta kemampuan lembaga dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan teknologi digital dalam proses audit dan pengawasan di BPR Delta Artha Sidoarjo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana integrasi kompetensi auditor dengan dukungan sistem digital dapat meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan akurasi proses deteksi dini terhadap indikasi kecurangan. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis auditor sebagai pengendali internal yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan memperkecil peluang terjadinya *fraud* dalam kegiatan operasional BPR.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran teknologi dan independensi auditor dalam konteks lembaga keuangan mikro yang tengah beradaptasi dengan transformasi digital. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar strategi bagi manajemen (khususnya BPR Delta Artha Sidoarjo) dalam merancang strategi peningkatan tata kelola dan pencegahan *fraud* secara berkelanjutan sehingga dapat memperkuat integritas dan menjaga kepercayaan publik. Dari sisi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro di Indonesia agar lebih transparan, berintegritas, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena empiris, dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

II.METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena memberi ruang bagi peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana pengendalian internal diterapkan, bagaimana auditor menjalankan tanggung jawabnya, dan bagaimana teknologi digital digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti dapat mengamati lebih dekat pengalaman, pola kerja, serta tantangan yang dihadapi auditor, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang independensi auditor serta efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pencegahan *fraud*.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran literasi teknologi digital dan independensi auditor dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada BPR Delta Artha Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital, serta bagaimana auditor menjalankan tugasnya secara objektif dan independen, dapat mendukung terciptanya sistem pengawasan yang efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Fokus penelitian tersebut dijabarkan ke dalam tiga aspek utama sebagai berikut.

1. Literasi Teknologi Digital

Literasi teknologi digital dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan auditor dan pegawai dalam memahami, mengoperasikan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan operasional, pengawasan, dan audit. Indikator yang digunakan untuk mengkaji aspek ini meliputi: kemampuan mengoperasikan sistem digital, khususnya *Core Banking System (CBS)*, pemahaman terhadap fitur dan fungsi sistem, kemampuan membaca, menafsirkan, dan menganalisis data digital, pemanfaatan teknologi digital dalam proses monitoring dan pengawasan, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi; dan partisipasi dalam pelatihan atau pengembangan kompetensi teknologi digital.

2. Independensi Auditor

Independensi auditor merupakan kemampuan auditor untuk menjalankan tugas pemeriksaan secara objektif, jujur, dan bebas dari tekanan maupun intervensi pihak lain. Aspek ini dikaji melalui beberapa indikator, yaitu: objektivitas dalam pelaksanaan audit, kebebasan dari pengaruh atau tekanan pihak lain, integritas dan kejujuran profesional, kepatuhan terhadap standar audit dan kode etik profesi dan independensi dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rekomendasi audit.

3. Efektivitas Pencegahan Fraud

Efektivitas pencegahan fraud dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mendeteksi, mengurangi, dan mencegah potensi terjadinya kecurangan melalui penerapan teknologi digital, pengendalian internal, dan pelaksanaan audit yang objektif. Indikator yang digunakan meliputi : kemampuan mendeteksi indikasi *fraud* secara dini, kecepatan dalam mengidentifikasi penyimpangan, kemampuan mengurangi peluang terjadinya *fraud*, efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, ketepatan tindak lanjut atas temuan audit dan menurunnya potensi atau frekuensi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan secara komprehensif bagaimana literasi teknologi digital dan independensi auditor, baik secara parsial maupun secara sinergis, berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada BPR Delta Artha Sidoarjo.

Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menetapkan informan dengan mengunjungi secara langsung objek penelitian, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian[24]. Teknik ini digunakan karena hanya individu tertentu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap isu yang dikaji. Dengan demikian, informan dipilih karena dianggap mampu memberikan data yang relevan, rinci, dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang diyakini memahami permasalahan secara substansial, memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan, serta dapat menyampaikan penjelasan yang dapat memperkaya temuan penelitian[25]. Pertimbangan lain yang digunakan antara lain kesediaan informan untuk berpartisipasi serta kapasitas mereka menyampaikan informasi secara jelas. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap memperoleh data yang representatif dan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan[26].

Jenis sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dalam pengumpulan informasi. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterlibatan dan pemahaman terhadap proses operasional, pengawasan, dan audit di BPR Delta Artha Sidoarjo. Penggunaan data primer dipilih agar peneliti

memperoleh informasi yang faktual dan mendalam mengenai peran literasi teknologi digital, independensi auditor, dan efektivitas pencegahan fraud.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada empat informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu bagian administrasi, bagian kepatuhan, internal audit, dan auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Observasi dilakukan di lingkungan kerja BPR Delta Artha Sidoarjo untuk mengamati secara langsung penggunaan teknologi digital, proses operasional, serta pelaksanaan pengendalian internal dan aktivitas pengawasan. Sementara itu, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto kegiatan wawancara dengan informan, catatan hasil wawancara, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggunaan sistem digital dan proses audit. Melalui ketiga teknik tersebut, peneliti memperoleh data yang saling melengkapi sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.[27].

Tabel 1 :

Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	V.N	Bag. Administrasi
2	E.V	Bag. Kepatuhan
3	K.Y	Internal Audit
4	R.M	Auditor KAP

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, yaitu BPR Delta Artha Sidoarjo. Pemilihan metode pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting, karena kesalahan pada tahap ini dapat membuat hasil penelitian kurang akurat. Jika data yang diperoleh tidak cukup kuat atau meragukan, proses analisis bisa terpengaruh bias dan pada akhirnya kesimpulan yang dihasilkan pun sulit dipertanggungjawabkan[28]. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi agar informasi yang diperoleh lebih utuh, terpercaya, dan benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek dan aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional, melainkan hanya mengamati proses yang berlangsung di lingkungan kerja BPR Delta Artha Sidoarjo. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penggunaan teknologi digital dalam kegiatan operasional, proses pengawasan internal, serta penerapan prosedur pengendalian yang mendukung upaya pencegahan *fraud*. Melalui observasi, peneliti dapat mencermati kondisi lingkungan kerja, pola interaksi antarpegawai, serta mekanisme penggunaan sistem digital seperti *Core Banking System* (CBS). Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai informasi penting yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi[29].

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan

keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan dan dinamika yang muncul selama proses wawancara berlangsung[30]. Seluruh wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan metode wawancara yang berbeda disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan lokasi masing-masing informan, tanpa mengurangi substansi informasi yang diperoleh. Seluruh wawancara dilaksanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang mengacu pada fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis maupun visual yang berkaitan dengan proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi serta sebagai bukti bahwa proses penelitian benar-benar dilaksanakan[31]. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh berupa foto kegiatan wawancara bersama para informan di BPR Delta Artha Sidoarjo. Foto-foto tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan pengumpulan data dan menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses audit dan pengawasan. Selain itu, dokumentasi ini juga berfungsi untuk mendukung keabsahan data serta melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Pengecekan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan upaya untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Melalui proses ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya serta layak dipertanggungjawabkan kebenarannya[26]. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari empat informan yang memiliki peran dan sudut pandang berbeda, yaitu bagian administrasi, bagian kepatuhan, internal audit, dan auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga peneliti dapat menilai konsistensi data yang diperoleh [32]. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan secara saling melengkapi. Melalui penerapan kedua teknik triangulasi tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang lebih tinggi.[33].

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis diawali dengan reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran literasi teknologi digital dan independensi auditor dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada BPR Delta Artha Sidoarjo, sedangkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian disisihkan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis berdasarkan tema-tema penelitian agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan seluruh data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BPR Delta Artha Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.16, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu lembaga keuangan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam sektor pembiayaan mikro. Dalam perkembangannya, BPR Delta Artha Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya transformasi, salah satunya melalui

penerapan teknologi digital dalam kegiatan operasional dan pengawasan. Penerapan teknologi digital tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman serta sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas[34]. Selain itu, penguatan fungsi audit internal juga menjadi fokus penting dalam mendukung pencegahan *fraud* di lingkungan perbankan[35].

Implementasi Teknologi Digital dalam Sistem Operasional dan Pengawasan

Dalam perkembangan operasional lembaga keuangan, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu aspek penting yang mendukung efisiensi dan akurasi kerja. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu V.N selaku bagian administrasi di BPR Delta Artha Sidoarjo, diketahui bahwa penggunaan teknologi digital telah menjadi bagian utama dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sistem seperti *Core Banking System* (CBS) dan pelaporan keuangan digital telah digunakan untuk menggantikan proses manual, khususnya dalam pencatatan transaksi dan pengolahan data.

“Dalam pekerjaan sehari-hari kami sudah menggunakan sistem, jadi transaksi dan pencatatan tidak lagi manual. Semua sudah masuk ke sistem dan datanya langsung tersimpan. Jadi lebih cepat dan lebih rapi dibandingkan sebelumnya.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa teknologi digital telah memberikan efisiensi yang cukup signifikan, terutama dalam mempercepat proses kerja dan meningkatkan kerapian serta ketersediaan data. Sistem juga membantu meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada metode manual. Namun demikian, dalam praktiknya pegawai tidak sepenuhnya bergantung pada sistem.

“Walaupun sudah pakai sistem, biasanya kami tetap cek ulang, terutama kalau ada transaksi yang jumlahnya besar atau yang menurut kami agak janggal. Jadi tidak langsung percaya begitu saja dengan data di sistem.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah digunakan, kepercayaan terhadap sistem belum sepenuhnya terbentuk. Pegawai masih mengandalkan pengecekan manual sebagai bentuk kontrol tambahan, yang mencerminkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya terotomatisasi. Tidak hanya digunakan dalam kegiatan operasional, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pengawasan agar lebih efektif. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Ibu E.V selaku bagian kepatuhan menunjukkan bahwa sistem digital telah terintegrasi dalam proses transaksi dan mempermudah pengawasan.

“Sekarang semua transaksi sudah langsung masuk ke sistem, jadi lebih mudah untuk dipantau. Kalau ada kesalahan biasanya bisa langsung kelihatan dari sistem, jadi membantu untuk pengecekan. Walaupun sudah ada sistem, kami tetap melakukan pengecekan manual juga, terutama untuk memastikan tidak ada kesalahan input. Karena kadang kesalahan itu bukan dari sistem, tapi dari orang yang input.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Hal ini mengindikasikan bahwa faktor manusia masih menjadi sumber utama potensi kesalahan, sehingga sistem belum mampu sepenuhnya menggantikan kontrol manual.

“Memang sistemnya sudah ada, tapi tidak semua pegawai paham fitur-fiturnya. Kebanyakan hanya pakai untuk input dan lihat data saja, belum sampai ke analisis yang lebih dalam.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan literasi teknologi digital pegawai tidak hanya memengaruhi penggunaan sistem, tetapi juga membatasi kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan indikasi kecurangan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa literasi teknologi digital pegawai masih belum merata, sehingga pemanfaatan sistem belum optimal, khususnya dalam mendukung fungsi analisis. Sementara itu, Ibu K.Y selaku internal audit menyampaikan bahwa teknologi digital memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan, terutama dalam penelusuran data.

“Dengan adanya sistem, kami lebih mudah untuk melakukan pengecekan karena data sudah tersimpan dan bisa dilihat kembali. Jadi kalau ada yang perlu ditelusuri, tinggal dicek di sistem. Dalam audit, kami tidak hanya melihat dari sistem saja, tapi juga mencocokkan dengan dokumen dan kondisi di lapangan. Karena kalau hanya dari sistem saja, ada kemungkinan hal-hal tertentu tidak terlihat. Sejauh ini sistem lebih banyak digunakan untuk pencatatan dan pelaporan. Untuk mendeteksi potensi kecurangan secara otomatis masih belum maksimal, jadi tetap perlu analisis manual dari auditor.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum berfungsi sebagai alat deteksi dini (*early warning system*), sehingga peran auditor masih sangat dominan dalam mengidentifikasi potensi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan literasi teknologi digital pegawai menyebabkan pemanfaatan sistem belum optimal, sehingga belum mampu mendukung secara maksimal fungsi pengawasan dan pencegahan *fraud*. Uraian di atas menunjukkan bahwa teknologi digital telah diimplementasikan dalam sistem operasional dan pengawasan. Namun efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, melainkan juga oleh manfaat yang dirasakan dalam praktik kerja sehari-hari. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dikaji peran teknologi digital dalam mendukung kegiatan operasional, yang selanjutnya difokuskan pada aspek tersebut. Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan operasional dapat dilihat dari pengalaman langsung para pegawai. Teknologi digital diketahui memberikan kemudahan yang signifikan dalam kegiatan operasional, khususnya dalam pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan dan pengolahan data transaksi.

“Kalau dibilang membantu, jelas membantu. Soalnya sekarang semua sudah langsung masuk ke sistem, jadi tidak perlu catat manual. Pekerjaan jadi lebih cepat dan tidak terlalu ribet. Kadang kalau sistemnya lambat atau ada gangguan, pekerjaan jadi ikut terhambat. Jadi mau tidak mau harus menunggu atau cari cara lain sementara.”(Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa selain memberikan kemudahan, penggunaan teknologi digital juga memiliki keterbatasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sistem juga menimbulkan risiko operasional ketika terjadi gangguan teknis. Sejalan dengan hal tersebut, teknologi digital sangat membantu dalam proses pengawasan dan pengecekan transaksi.

“Iya, sangat membantu. Dengan sistem, kami bisa langsung lihat data transaksi tanpa harus cari dokumen satu-satu. Jadi lebih cepat untuk pengecekan. Tapi tetap tidak bisa hanya mengandalkan sistem. Kami masih perlu cek manual juga, karena kadang kesalahan itu dari input, bukan dari sistemnya. Kalau yang pakai paham, pasti sangat membantu. Tetapi, jika pengguna belum terlalu memahami, biasanya pemanfaatannya masih terbatas pada proses input data saja.”(Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 202)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi dalam mendukung pengawasan dan pencegahan *fraud* sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi teknologi digital pengguna. Selain itu, teknologi digital juga memberikan manfaat dalam kegiatan audit.

“Kalau untuk audit, sistem sangat membantu karena data sudah tersimpan dan bisa diakses kapan saja. Jadi lebih mudah untuk melakukan pengecekan dibandingkan kalau masih manual. Walaupun begitu, kami tidak hanya mengandalkan sistem. Tetap harus dicek dengan dokumen dan kondisi di lapangan, karena tidak semua bisa terlihat dari sistem. Untuk membantu mendeteksi hal-hal yang mencurigakan secara otomatis masih belum terlalu terasa. Jadi analisis tetap banyak dilakukan secara manual.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya mendukung fungsi analisis dalam audit. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun teknologi digital telah meningkatkan efisiensi operasional, pemanfaatannya dalam mendukung analisis risiko dan pencegahan *fraud* masih terbatas, terutama karena perbedaan tingkat literasi digital antar pegawai. Untuk memperkuat temuan penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak R.M selaku auditor KAP guna memperoleh perspektif eksternal terkait pemanfaatan teknologi digital dalam

pengawasan dan pencegahan fraud. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak R.M menyampaikan bahwa penggunaan sistem seperti *Core Banking System* (CBS) telah meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, namun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko kesalahan maupun kecurangan.

“Secara umum sistem sangat membantu, tapi tetap hanya alat. Risiko masih ada, terutama dari kesalahan atau unsur kesengajaan pengguna.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Bapak R.M menilai bahwa praktik pengecekan manual yang masih dilakukan merupakan bentuk pengendalian yang baik karena menciptakan kontrol berlapis. Hal ini penting untuk memastikan keandalan data, mengingat sistem tidak sepenuhnya bebas dari risiko kesalahan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa kemampuan sistem dalam mendeteksi fraud masih belum optimal sebagai alat deteksi dini, sehingga analisis manual auditor tetap diperlukan dalam proses pengawasan.

“Pengecekan manual itu justru bagus sebagai kontrol tambahan. Dalam audit, kami juga tidak hanya mengandalkan sistem. Deteksi fraud otomatis belum tentu tersedia di semua sistem, jadi analisis manual masih sangat diperlukan.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Selain itu, Bapak R.M menekankan bahwa keterbatasan literasi teknologi pegawai menjadi kendala utama dalam pemanfaatan sistem secara optimal.

“Masalahnya sering ada di pengguna. Kalau hanya dipakai untuk input, maka manfaat sistem belum maksimal.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Secara keseluruhan, Bapak R.M menyimpulkan bahwa implementasi teknologi digital sudah berjalan dengan baik, namun perlu dioptimalkan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan fitur sistem secara lebih maksimal.

Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Fraud

Dalam upaya pencegahan fraud, akurasi dan keandalan pencatatan transaksi merupakan aspek krusial yang dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem digital memungkinkan setiap aktivitas operasional terdokumentasi secara sistematis, sehingga meminimalkan risiko kehilangan data maupun manipulasi yang tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam proses pencatatan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pengendalian internal dalam menjaga keamanan dan integritas informasi keuangan.

“Kalau dari sisi pencatatan, sistem itu membantu supaya tidak ada data yang hilang atau diubah sembarangan, karena semua sudah tercatat. Jadi lebih aman dibandingkan manual. Tapi kalau untuk mencegah kecurangan sepenuhnya, menurut saya belum. Karena tetap tergantung orang yang menjalankan. Kalau misalnya ada yang sengaja, tetap bisa saja terjadi. Selama ini sistem lebih ke pencatatan saja, belum sampai yang bisa langsung kasih tanda kalau ada transaksi yang aneh.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum berfungsi sebagai alat pencegahan *fraud* secara aktif, yang mengindikasikan bahwa rendahnya literasi teknologi digital pegawai menyebabkan fitur sistem belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung deteksi dini kecurangan

“Dengan sistem, kami bisa lebih mudah memantau transaksi. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, biasanya bisa cepat diketahui. Tapi tetap tidak bisa hanya mengandalkan sistem... kami lebih banyak mengandalkan pengalaman dan pengecekan langsung.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem digital belum memiliki peran dominan dalam mendeteksi kecurangan, melainkan masih bergantung pada analisis yang dilakukan oleh auditor

“Untuk mendeteksi kecurangan, tetap lebih banyak dari analisis auditor. Sistem hanya membantu menyediakan data.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan fraud masih lebih banyak bergantung pada peran manusia dibandingkan sistem yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital di BPR Delta Artha Sidoarjo belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat utama dalam pencegahan *fraud*, melainkan masih berperan sebagai pendukung dalam proses kerja. Keterbatasan sistem dalam mendeteksi indikasi kecurangan serta belum optimalnya pemanfaatan fitur analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan *fraud* masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketelitian sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana penggunaan sistem digital dapat mendukung proses pengawasan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menyimpan dan menyajikan data secara terstruktur. Sistem digital membantu proses pengawasan karena seluruh transaksi tercatat dengan baik dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

“Iya, membantu, karena semua transaksi sudah tersimpan di sistem. Jadi kalau mau dicek ulang bisa langsung dilihat tanpa harus cari data manual.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital telah meningkatkan efisiensi dalam proses penelusuran data serta mempermudah kegiatan pengecekan ulang transaksi. Dengan tersedianya data secara terpusat dan terdokumentasi, proses pengawasan menjadi lebih praktis dibandingkan dengan metode manual yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun demikian, dalam praktiknya pengawasan belum dilakukan secara berkelanjutan atau *real-time* melalui sistem.

“Tapi biasanya tidak dipantau terus setiap saat. Paling dicek kalau ada kebutuhan atau kalau ada yang dirasa tidak biasa.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem secara teknis memungkinkan dilakukannya pengawasan secara terus-menerus, pemanfaatannya masih bersifat insidental, yaitu hanya dilakukan pada saat tertentu atau ketika terdapat indikasi yang dianggap tidak wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berbasis sistem belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat monitoring yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E.V, diketahui bahwa sistem digital yang digunakan di BPR Delta Artha Sidoarjo pada dasarnya telah mampu mendukung proses pengawasan, terutama karena data transaksi tersaji secara *real-time* dan dapat diakses kapan saja.

“Kami pakai sistem lebih ke input dan lihat data saja, belum sampai ke analisis yang lebih dalam. Kalau dari sistem, sebenarnya bisa dipantau terus, karena datanya real-time. Jadi kapan saja bisa dicek.” (Petikan wawancara dengan Ibu E, 18 Februari 2026)

Namun demikian, dalam praktiknya pengawasan belum dilakukan secara optimal dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat monitoring yang berkelanjutan.

“Tapi kami tidak selalu memantau setiap saat. Biasanya ada waktu tertentu untuk pengecekan atau kalau ada hal yang perlu ditindaklanjuti.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu K.Y selaku internal audit, diketahui bahwa sistem digital memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung pelaksanaan audit, terutama dalam hal kemudahan akses terhadap data historis.

“Sistem sangat membantu karena data bisa dilihat kapan saja. Jadi untuk audit, kami lebih mudah menelusuri transaksi. Pengawasan yang kami lakukan biasanya periodik, tidak setiap saat memantau melalui sistem. Jadi lebih ke pemeriksaan berkala. Walaupun ada sistem, yang menentukan itu tetap auditor. Sistem hanya menyediakan data, tapi analisis tetap dari kami.” (Petikan wawancara dengan Ibu K, 15 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem secara teknis memungkinkan pengawasan berkelanjutan, dalam praktiknya pengawasan masih bersifat periodik dan belum terintegrasi secara *real-time*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah dalam pengendalian internal yang dapat dimanfaatkan untuk terjadinya kecurangan. Sebagai penguatan terhadap temuan tersebut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* di BPR Delta Artha Sidoarjo masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu V.N, diketahui bahwa upaya pencegahan *fraud* telah dilakukan melalui penerapan sistem digital dan prosedur kerja yang mengatur pencatatan serta pelaporan transaksi, namun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan.

“Lebih aman, karena semua harus masuk ke sistem. Jadi tidak bisa asal catat atau ubah data begitu saja. Kalau untuk benar-benar mencegah kecurangan, menurut saya belum sepenuhnya. Karena tetap tergantung orangnya juga. Kalau ada yang sengaja atau kurang teliti, masih bisa terjadi.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Sejalan dengan hal tersebut, Ibu E.V juga menyampaikan bahwa sistem digital membantu dalam proses pemantauan transaksi, namun belum mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis, sehingga masih diperlukan pengecekan secara aktif oleh pegawai.

“Dengan sistem, kami bisa lebih cepat melihat data dan memantau transaksi. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, biasanya bisa langsung diketahui. Kalau untuk mendeteksi kecurangan secara otomatis, sistemnya belum sampai ke situ. Jadi kami tetap harus aktif melakukan pengecekan.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Selain itu, faktor kesalahan manusia (*human error*) juga masih menjadi kendala dalam efektivitas pencegahan *fraud*, seperti kesalahan input data atau kurangnya ketelitian dalam menjalankan prosedur.

“Kadang bukan dari sistemnya, tapi dari orang yang menjalankan. Jadi tetap perlu ketelitian dan pengecekan manual.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Dari perspektif audit, Ibu K.Y menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* tidak hanya bergantung pada sistem dan pengendalian internal, tetapi juga pada peran auditor dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap aktivitas operasional.

“Selama ini pencegahan dilakukan melalui pengendalian internal dan audit. Kami melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada hal yang tidak sesuai. Karena audit dilakukan secara periodik, jadi tidak semua bisa terpantau setiap saat.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Lebih lanjut, para informan juga menyoroti perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi digital di masa yang akan datang, khususnya melalui peningkatan literasi digital pegawai serta pengembangan sistem yang mampu mendukung deteksi dini kecurangan.

“Mungkin ke depannya perlu lebih banyak pelatihan, supaya kami tidak hanya pakai sistem untuk input, tapi juga bisa lebih paham datanya.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas pencegahan *fraud* di BPR Delta Artha Sidoarjo belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sistem dalam mendeteksi indikasi kecurangan secara otomatis serta belum meratanya literasi teknologi digital pegawai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan sistem dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal dalam mendukung pencegahan *fraud*. Sejalan dengan temuan dari para informan sebelumnya, dilakukan wawancara dengan Bapak R.M selaku auditor KAP guna memperoleh perspektif eksternal terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pandangan beliau, pemanfaatan teknologi digital yang telah berjalan di BPR Delta Artha Sidoarjo pada dasarnya sudah berada pada tahap yang cukup baik dari sisi operasional, namun belum optimal dalam fungsi pengawasan dan pencegahan *fraud*.

“Kalau dilihat dari praktiknya, penggunaan sistem seperti core banking itu sudah sangat membantu, terutama untuk pencatatan dan penyimpanan data. Dari sisi efisiensi dan kerapian data, itu sudah baik. Tapi memang, di banyak lembaga keuangan, sistem masih lebih difungsikan sebagai alat administrasi, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk analisis atau pengawasan yang lebih dalam.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Lebih lanjut, beliau menanggapi temuan terkait masih adanya pengecekan manual yang dilakukan oleh pegawai dan auditor. Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan kelemahan, melainkan bentuk pengendalian tambahan yang justru diperlukan.

“Pengecekan manual itu bukan berarti sistemnya tidak bagus, tapi justru sebagai bentuk kontrol berlapis. Dalam praktik audit, kami juga tidak pernah hanya mengandalkan sistem. Data dari sistem tetap perlu diverifikasi kembali, apalagi untuk transaksi yang berisiko tinggi atau yang terlihat tidak wajar. Jadi kombinasi antara sistem dan pengecekan manual itu sebenarnya sudah tepat, tinggal bagaimana konsistensinya dijaga.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Dengan demikian, pandangan auditor KAP memperkuat temuan sebelumnya bahwa teknologi digital dan peran auditor masih perlu diintegrasikan secara lebih kuat melalui peningkatan literasi digital, penguatan fungsi analisis, serta pengembangan sistem yang mendukung pengawasan secara berkelanjutan.

Peran Auditor dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud

Dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan, lembaga keuangan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu V.N selaku bagian administrasi di BPR Delta Artha Sidoarjo, diketahui bahwa pengendalian internal secara umum telah diterapkan melalui prosedur kerja yang mengatur pembagian tugas, pencatatan transaksi, serta penggunaan sistem digital dalam aktivitas sehari-hari. Ibu V.N menjelaskan bahwa setiap transaksi wajib diproses melalui sistem dan tidak diperkenankan dilakukan secara manual tanpa pencatatan. Penerapan tersebut bertujuan agar seluruh aktivitas dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses penelusuran apabila sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, pembagian tugas antarpegawai juga telah diatur dengan jelas guna menghindari terjadinya penumpukan wewenang pada satu individu

“Kalau di sini sebenarnya sudah ada pembagian tugas dan semua transaksi juga harus masuk ke sistem. Jadi secara aturan sudah jelas dan lebih terkontrol. Kalau lagi ada keterbatasan orang, semisal cuti atau kunjungan kerja kadang memang ada yang merangkap kerjaan. Jadi tidak selalu ideal seperti yang di atur.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, implementasinya masih bergantung pada situasi dan kondisi operasional. Terkait dengan peran auditor, Ibu V.N memandang bahwa auditor memiliki fungsi sebagai pihak yang melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

“Biasanya auditor datang untuk mengecek, jadi kalau ada yang kurang sesuai bisa diketahui. Tapi memang lebih ke pemeriksaan setelah kegiatan berjalan.” (Petikan wawancara dengan Ibu V, 16 Februari 2026)

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa peran auditor, khususnya dari sudut pandang bagian administrasi, masih lebih terlihat sebagai fungsi *deteksi (detective control)* dibandingkan sebagai pencegahan (*preventive control*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E.V, diketahui bahwa pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. dijelaskan menjelaskan bahwa setiap kegiatan operasional, khususnya transaksi keuangan, telah memiliki *standar*

operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh seluruh pegawai. Prosedur tersebut mencakup tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga pelaporan.

“Pengendalian internal itu penting supaya semua pekerjaan sesuai aturan. Jadi setiap transaksi ada prosedurnya dan harus mengikuti itu.” (Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Namun demikian Ibu E.V juga mengakui bahwa keberadaan prosedur dan sistem tidak sepenuhnya menjamin terhindarnya kesalahan maupun potensi kecurangan. Dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan, terutama yang disebabkan oleh faktor manusia (human error), seperti kesalahan input data atau kelalaian dalam proses pengecekan.

“Walaupun sudah ada prosedur dan sistem, tetap ada kemungkinan kesalahan, apalagi kalau dari input. Jadi tidak bisa sepenuhnya mengandalkan itu saja.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu K.Y selaku internal audit, diketahui bahwa auditor memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional. Ibu K.Y menjelaskan bahwa tugas utama auditor adalah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Auditor juga bertanggung jawab dalam menilai apakah sistem pengendalian internal yang ada telah berjalan secara efektif.

“Peran kami lebih ke memastikan apakah pengendalian yang ada sudah berjalan atau belum. Jadi kami melihat dari prosedur dan pelaksanaannya. Untuk mencegah kecurangan, tidak hanya dari audit, tapi dari semua bagian. Kalau pengendalian internalnya lemah, potensi kecurangan tetap ada.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Keterbatasan dalam pelaksanaan audit menyebabkan proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh aktivitas operasional. Dalam pelaksanaannya, audit tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Pemeriksaan biasanya dilakukan secara periodik, jadi tidak setiap saat memantau semua aktivitas.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Selain itu, K.Y juga mengungkapkan bahwa dalam mendeteksi indikasi *fraud*, auditor masih sangat bergantung pada kemampuan analisis individu, bukan sepenuhnya pada sistem digital.

“Sistem membantu menyediakan data, tapi untuk melihat indikasi kecurangan tetap perlu analisis dari auditor.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital telah digunakan, peran auditor sebagai pengambil keputusan tetap dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan peran auditor telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencegah *fraud* karena masih terdapat kelemahan dalam implementasi, seperti perangkapan tugas dan pengawasan yang belum berkelanjutan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Auditor KAP, Bapak R.M, yang menekankan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaannya.

“Secara konsep, pengendalian internal yang ada sudah cukup baik karena sudah ada prosedur dan pembagian tugas. Tapi yang paling penting itu konsistensi dalam pelaksanaannya. Kalau dalam praktik masih ada perangkapan tugas, itu bisa membuka celah risiko dan mengurangi efektivitas pengendalian.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengendalian internal telah dirancang secara memadai, efektivitasnya dalam mencegah *fraud* sangat bergantung pada konsistensi penerapan, kepatuhan terhadap prosedur, serta minimnya perangkapan tugas dalam praktik operasional.

Independensi Auditor dalam Pencegahan Fraud

Keberadaan auditor internal menjadi salah satu mekanisme penting dalam sistem pengendalian, terutama dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi kecurangan. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu V.N memandang bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam menjaga pengawasan, termasuk dalam mencegah terjadinya kecurangan.

“Kalau dari kami, auditor itu memang penting, karena mereka yang melakukan pengecekan ulang. Jadi kalau ada kesalahan atau hal yang tidak sesuai biasanya bisa diketahui dari audit. Biasanya kalau ada audit, kami juga diminta menjelaskan data atau transaksi. Jadi tetap ada komunikasi, tidak benar-benar terpisah.”
(Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)

Dalam praktiknya, audit tidak selalu berorientasi pada penemuan kecurangan, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk memperbaiki proses kerja.

“Kalau ada temuan, biasanya disampaikan dan jadi bahan perbaikan. Tapi tidak selalu langsung dikaitkan dengan kecurangan, kadang hanya dianggap kesalahan.” **(Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E.V, diketahui bahwa independensi auditor dipandang sebagai aspek yang sangat penting dalam menjaga objektivitas dalam proses pengawasan dan pemeriksaan. Auditor diharapkan mampu menjalankan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, sehingga hasil audit yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan

*“Auditor itu harus independen supaya bisa menilai secara objektif. Jadi tidak terpengaruh oleh bagian mana pun. Kadang dalam pelaksanaan, auditor juga melihat kondisi di lapangan. Jadi tidak semua langsung dianggap pelanggaran, tapi dilihat dulu penyebabnya.”***(Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)**

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa dalam praktiknya, independensi auditor tidak berarti bekerja secara terpisah sepenuhnya tanpa interaksi dengan bagian lain. Koordinasi tetap diperlukan, terutama dalam proses klarifikasi data dan pemahaman terhadap alur transaksi yang terjadi.

*“Walaupun independen, tetap ada koordinasi dengan bagian lain, terutama untuk klarifikasi data. Kalau ada temuan, biasanya lebih ke perbaikan proses dulu, bukan langsung ke arah kecurangan.”***(Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu K.Y selaku pihak internal audit, diketahui bahwa independensi auditor dipandang sebagai prinsip yang sangat penting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Independensi dianggap sebagai syarat utama agar auditor dapat memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak dalam mengevaluasi aktivitas operasional maupun pengendalian internal yang berjalan di perusahaan.

“Sebagai auditor, kami harus independen dalam melakukan pemeriksaan, supaya hasilnya objektif dan tidak memihak. Karena kami masih dalam satu organisasi, pasti tetap ada hubungan kerja dengan bagian lain. Jadi dalam pelaksanaan tetap perlu menjaga komunikasi.” **(Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)**

Lebih lanjut, Ibu K.Y menjelaskan bahwa dalam mendeteksi potensi kecurangan, auditor tidak sepenuhnya bergantung pada sistem digital yang digunakan oleh perusahaan. Sistem hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam menyediakan data, sementara proses analisis tetap dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman dan penilaian auditor.

“Untuk melihat indikasi kecurangan, kami lebih banyak menggunakan analisis sendiri dan melihat data yang ada. Sistem hanya membantu menyediakan informasi. Pemeriksaan biasanya dilakukan secara berkala”
(Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Dengan demikian, independensi auditor di BPR Delta Artha Sidoarjo telah diterapkan secara formal, namun dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan karena adanya hubungan kerja internal. Hal ini menyebabkan peran auditor cenderung lebih bersifat evaluatif dibandingkan preventif, sehingga kontribusinya dalam pencegahan *fraud* belum optimal dalam pencegahan *fraud*. Bapak R.M juga menegaskan bahwa peran auditor tidak hanya bersifat detektif, tetapi juga preventif melalui evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem yang berkelanjutan.

“Selama ini auditor memang sering dipandang hanya sebagai pemeriksa setelah kegiatan berjalan. Padahal sebenarnya auditor juga berperan dalam pencegahan, yaitu dengan mengevaluasi sistem yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan supaya ke depannya bisa lebih baik.” **(Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)**

Terkait independensi, Bapak R.M menjelaskan bahwa auditor internal memiliki keterbatasan karena berada dalam satu organisasi, namun independensi tetap dapat dijaga melalui profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar audit.

“Kalau auditor internal, independensinya memang tidak bisa sepenuhnya seperti auditor eksternal karena masih berada dalam satu organisasi. Tapi selama auditor menjalankan tugasnya secara profesional dan mengikuti standar yang ada, objektivitas itu tetap bisa dijaga.” **(Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)**

Lebih lanjut, Bapak R.M menekankan bahwa teknologi digital dan auditor memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Sistem berfungsi sebagai penyedia data, sementara auditor memastikan keandalan serta melakukan analisis, khususnya dalam mendeteksi indikasi *fraud*.

“Teknologi itu membantu dari sisi penyediaan data dan transparansi, karena semua sudah tercatat di sistem. Tapi sistem hanya alat bantu. Untuk memastikan data itu benar dan untuk melihat indikasi kecurangan, tetap diperlukan analisis dan pertimbangan dari auditor.” **(Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)**

Efektivitas Pencegahan Fraud dan Upaya Strategis ke Depan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu V.N di BPR Delta Artha Sidoarjo, diketahui bahwa upaya pencegahan *fraud* di tingkat operasional sudah dilakukan melalui penerapan sistem digital dan prosedur kerja yang mengatur pencatatan serta pelaporan transaksi

“Lebih aman, karena semua harus masuk ke sistem. Jadi tidak bisa asal catat atau ubah data begitu saja. Kalau untuk benar-benar mencegah kecurangan, menurut saya belum sepenuhnya. Karena tetap tergantung orangnya juga. Kalau ada yang sengaja atau kurang teliti, masih bisa terjadi.” **(Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)**

Terkait upaya ke depan, Ibu V.N berpendapat bahwa peningkatan pemahaman pegawai terhadap sistem menjadi hal yang penting.

“Mungkin ke depannya perlu lebih banyak pelatihan, supaya kami tidak hanya pakai sistem untuk input, tapi juga bisa lebih paham datanya.” **(Petikan wawancara dengan Ibu V.N, 16 Februari 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E.V, diketahui bahwa secara umum pencegahan *fraud* telah didukung oleh adanya sistem digital dan pengendalian internal yang mengatur proses kerja.

“Dengan sistem, kami bisa lebih cepat melihat data dan memantau transaksi. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, biasanya bisa langsung diketahui. Kalau untuk mendeteksi kecurangan secara otomatis, sistemnya belum sampai ke situ. Jadi kami tetap harus aktif melakukan pengecekan.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Selain itu, Ibu E.V juga menyoroti bahwa kesalahan yang terjadi seringkali berasal dari *human error*, seperti kesalahan input atau kurang teliti dalam menjalankan prosedur.

“Kadang bukan dari sistemnya, tapi dari orang yang menjalankan. Jadi tetap perlu ketelitian dan pengecekan manual. Ke depan mungkin perlu sistem yang bisa memberikan peringatan otomatis, dan juga peningkatan kemampuan pegawai supaya bisa memanfaatkan sistem dengan lebih maksimal.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Sejalan dengan hal tersebut, Ibu E.V juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pencegahan fraud.

“Dari sisi teknologi sudah membantu, tapi masih perlu dioptimalkan, apalagi sekarang transaksi banyak yang digital. Selain itu, SDM juga penting, karena kalau orangnya kurang paham atau kurang teliti, tetap bisa jadi celah.” (Petikan wawancara dengan Ibu E.V, 18 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu K.Y, diketahui bahwa pencegahan *fraud* tidak hanya bergantung pada sistem dan pengendalian internal, tetapi juga pada peran auditor dalam melakukan evaluasi dan analisis. Ibu K.Y menjelaskan bahwa auditor selama ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal serta mengidentifikasi potensi penyimpangan.

“Selama ini pencegahan dilakukan melalui pengendalian internal dan audit. Kami melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada hal yang tidak sesuai. Karena audit dilakukan secara periodik, jadi tidak semua bisa terpantau setiap saat. Ada kemungkinan hal-hal tertentu terlewat dan untuk melihat indikasi kecurangan, kami lebih banyak menggunakan analisis sendiri. Sistem hanya membantu menyediakan data.” (Petikan wawancara dengan Ibu K.Y, 15 Maret 2026)

Dengan demikian, efektivitas pencegahan *fraud* di BPR Delta Artha Sidoarjo belum berjalan secara optimal, yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu literasi teknologi digital dan independensi auditor. Keterbatasan literasi teknologi digital menyebabkan pemanfaatan sistem belum maksimal, khususnya dalam mendukung fungsi analisis dan deteksi dini. Sementara itu, independensi auditor yang dalam praktiknya masih terbatas pada hubungan internal organisasi menyebabkan peran auditor lebih bersifat evaluatif daripada preventif. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut belum mampu secara optimal meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud*. Untuk memperkuat temuan penelitian, wawancara dengan Bapak R.M selaku auditor KAP menunjukkan bahwa upaya pencegahan *fraud* melalui sistem digital dan pengendalian internal telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor manusia dan keterbatasan sistem.

“Kalau dilihat dari sistem dan prosedur yang ada, sebenarnya sudah cukup mendukung pencegahan fraud. Semua transaksi sudah tercatat dan bisa ditelusuri. Tapi memang belum bisa sepenuhnya mencegah, karena masih bergantung pada pengguna. Kalau ada kesalahan input atau unsur kesengajaan, sistem tidak selalu bisa langsung mendeteksi.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Bapak R.M juga menegaskan bahwa sistem yang digunakan umumnya belum berfungsi optimal sebagai alat deteksi dini, sehingga analisis auditor tetap menjadi faktor utama.

“Sebagian besar sistem masih fokus pada pencatatan dan pelaporan, belum sampai pada deteksi otomatis yang kuat. Untuk melihat indikasi kecurangan, tetap perlu analisis dari auditor. Jadi peran auditor masih sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh sistem.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Lebih lanjut, Bapak R.M menyoroti bahwa keterbatasan literasi teknologi digital menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan sistem dalam mendukung pencegahan *fraud*.

“Seringkali kendalanya bukan di sistemnya, tapi di pemahaman pengguna. Banyak yang hanya menggunakan sistem untuk input data saja, belum sampai ke analisis. Padahal kalau dimanfaatkan lebih jauh, sistem bisa membantu pengawasan lebih efektif.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Terkait upaya ke depan, Bapak R.M menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM serta pengembangan sistem yang lebih adaptif.

“Ke depan, perlu ada pelatihan supaya pegawai lebih memahami sistem, tidak hanya sekedar menggunakan. Selain itu, sistem juga perlu dikembangkan agar bisa memberikan peringatan dini terhadap transaksi yang berisiko, sehingga fungsi pencegahan bisa lebih optimal.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 20 Maret 2026)

Selain itu, faktor sumber daya manusia menjadi hal penting karena pemahaman dan ketelitian pegawai sangat memengaruhi efektivitas penggunaan sistem dalam mencegah *fraud*. Oleh karena itu, diperlukan upaya ke depan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem digital, tetapi juga pada peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Auditor KAP, Bapak R.M, yang menyatakan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh kualitas SDM dan independensi auditor.

“Teknologi tidak akan efektif tanpa pemahaman pengguna, dan auditor harus tetap independen agar penilaiannya objektif. Pengawasan juga seharusnya bisa dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berkala.” (Petikan wawancara dengan Bapak R.M, 17 Maret 2026)

Dengan demikian, meskipun secara teoretis pencegahan *fraud* dapat didukung oleh sistem yang terintegrasi, dalam praktiknya efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kekuatan independensi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan fraud pada BPR Delta Artha Sidoarjo dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi digital, tingkat independensi auditor, serta sinergi antara keduanya dalam mendukung sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, auditor telah memanfaatkan teknologi digital, khususnya *Core Banking System (CBS)*, untuk mendukung aktivitas operasional, pengawasan, dan audit. Sistem tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses data transaksi, menelusuri histori keuangan, serta melakukan pengecekan terhadap aktivitas operasional secara lebih cepat dan terstruktur dibandingkan dengan metode manual. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, auditor dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi digital oleh auditor masih terbatas pada fungsi administratif dan operasional, seperti pencatatan, pelaporan, dan penyediaan data. Auditor belum memanfaatkan teknologi secara optimal sebagai alat analisis untuk mendeteksi indikasi kecurangan. Hal ini terlihat dari belum adanya penggunaan fitur analisis lanjutan maupun sistem deteksi dini (*early warning system*) yang mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara otomatis. Dalam pelaksanaan audit, auditor masih sangat bergantung pada analisis manual, pengalaman profesional, serta pengecekan langsung terhadap dokumen dan kondisi di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital belum digunakan sebagai alat utama dalam pengambilan keputusan audit, melainkan masih berfungsi sebagai alat pendukung dalam menyediakan data. Keterbatasan tersebut juga menunjukkan bahwa literasi teknologi digital auditor masih perlu ditingkatkan. Auditor cenderung menggunakan sistem pada tingkat operasional dasar, yaitu sebatas mengakses dan memeriksa data, tanpa memanfaatkan fitur sistem secara mendalam untuk melakukan analisis data secara komprehensif. Akibatnya, kemampuan auditor dalam mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar maupun mendeteksi potensi fraud berbasis sistem masih terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital belum mendukung pengawasan yang bersifat berkelanjutan (*continuous monitoring*)[36]. Pengawasan masih dilakukan secara periodik atau berdasarkan kebutuhan tertentu, sehingga sistem belum digunakan sebagai alat monitoring *real-time* yang proaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya berperan sebagai alat strategis dalam mendukung pencegahan *fraud*, melainkan masih sebagai alat bantu dalam proses audit[37]. Dalam perspektif teori *fraud* modern, kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh auditor belum mampu secara optimal menekan faktor *opportunity* (kesempatan), yang

merupakan salah satu elemen utama dalam teori *Fraud Hexagon*[38]. Secara teoretis, sistem digital yang terintegrasi dan berbasis *real-time* seharusnya dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan melalui transparansi, monitoring berkelanjutan, serta deteksi dini terhadap transaksi yang tidak wajar[39]. Namun dalam praktiknya, keterbatasan pemanfaatan teknologi dan rendahnya literasi digital menyebabkan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal[40]. Dengan demikian, meskipun auditor telah memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, pemanfaatannya masih bersifat operasional dan belum berkembang ke arah analitis dan preventif.

Di sisi lain, independensi auditor merupakan unsur penting dalam menjaga objektivitas dan kualitas hasil audit. Berdasarkan hasil penelitian, independensi auditor di BPR Delta Artha Sidoarjo telah diterapkan secara formal, di mana auditor menjalankan fungsi pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas operasional serta pengendalian internal secara profesional[39]. Namun demikian, dalam praktiknya independensi auditor masih menghadapi keterbatasan. Hal ini disebabkan karena auditor internal berada dalam satu struktur organisasi, sehingga tetap memiliki hubungan kerja dengan bagian lain. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat independensi dalam pengambilan keputusan, meskipun tidak secara langsung menghilangkan objektivitas auditor[41]. Selain itu, pelaksanaan audit yang masih bersifat periodik menunjukkan bahwa peran auditor cenderung lebih bersifat *detective control* (mendeteksi setelah kejadian) dibandingkan *preventive control* (mencegah sebelum terjadi). Dalam mendeteksi *fraud*, auditor juga masih sangat bergantung pada analisis manual berdasarkan pengalaman, sementara sistem digital hanya berfungsi sebagai penyedia data[42]. Dalam perspektif teori audit, independensi auditor yang kuat seharusnya didukung oleh sistem pengawasan yang berkelanjutan serta kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi *fraud*. Auditor tidak hanya berperan dalam menemukan kesalahan, tetapi juga dalam memberikan rekomendasi strategis untuk mencegah terjadinya kecurangan.[43]. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor di BPR Delta Artha Sidoarjo telah berjalan secara formal, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencegahan fraud secara preventif

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor di BPR Delta Artha Sidoarjo telah berjalan secara formal, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencegahan fraud secara preventif[44]. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara kedua aspek tersebut belum berjalan secara optimal. Pemanfaatan teknologi digital oleh auditor masih terbatas pada penyediaan data, sementara independensi auditor dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan struktural. Selain itu, pengawasan yang masih bersifat periodik menyebabkan proses monitoring belum berjalan secara berkelanjutan[45]. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya mendukung auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya, auditor masih menjadi faktor dominan dalam proses analisis, sehingga efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kemampuan individu. Secara teoretis, teknologi digital berperan sebagai alat dalam menyediakan data dan sistem monitoring, literasi digital mendukung kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi, serta independensi auditor menjamin objektivitas dalam proses pengawasan. Kombinasi ketiga faktor ini seharusnya mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif dalam mencegah *fraud*[46]. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pencegahan *fraud* di BPR Delta Artha Sidoarjo memerlukan penguatan secara simultan pada ketiga aspek tersebut, yaitu optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi teknologi digital pegawai, serta penguatan independensi auditor. Sinergi yang optimal antara ketiga faktor tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mencegah terjadinya *fraud*[47].

IV.KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi digital dan independensi auditor di BPR Delta Artha Sidoarjo belum berjalan secara optimal dalam mendukung pengawasan dan pencegahan fraud. Auditor telah memanfaatkan teknologi digital, khususnya *Core Banking System* (CBS), untuk meningkatkan efisiensi dalam akses data, penelusuran transaksi, dan pemeriksaan historis, namun penggunaannya masih terbatas pada fungsi pencatatan, pelaporan, dan penyedia data, serta belum dimaksimalkan sebagai alat analisis untuk mendeteksi potensi kecurangan maupun sebagai sistem peringatan dini dan pengawasan *real-time*, sehingga auditor masih bergantung pada analisis manual dan pengalaman. Di sisi lain, independensi auditor telah diterapkan secara formal, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan karena berada dalam satu struktur organisasi dan pelaksanaan audit yang bersifat periodik, yang menyebabkan peran auditor lebih dominan pada fungsi deteksi setelah kejadian dibandingkan pencegahan serta masih bergantung pada penilaian individu. Selain itu, sinergi antara pemanfaatan teknologi digital dan independensi auditor belum terintegrasi secara optimal, sehingga pengawasan belum bersifat proaktif dan berkelanjutan serta masih bergantung pada kemampuan individu auditor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* di BPR Delta Artha Sidoarjo belum optimal, karena pemanfaatan teknologi digital oleh auditor masih bersifat operasional, independensi auditor belum sepenuhnya mendukung fungsi preventif, serta belum terciptanya integrasi yang kuat antara teknologi dan peran auditor dalam mendukung pengawasan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] R. Ricky, R. Ristiyana, M. Mahdi, H. Leon, and N. Novianty, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Perbankan Di Era New Normal," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 23, no. 2, pp. 1–5, 2022.
- [2] L. N. Hakim and K. P. Suryatimur, "Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 10, no. 3, pp. 523–532, 2022, doi: 10.37641/jiakes.v10i3.1412.
- [3] N. Hafizna, "Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Kecurangan (Fraud)," vol. 3, no. 2, pp. 85–102, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i2.1797>
- [4] A. Misrina, A. B. Pramesti, A. M. Mulyawati, D. S. Salsabillah, and D. M. Putri, "Peranan Audit Berbasis Teknologi Informasi dalam Mendeteksi Indikasi Fraud pada Era Transformasi Digital," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, vol. 1, no. 2, pp. 65–77, 2021.
- [5] Fitriani, F. Inryani, and Masyhuri, "Studi Literatur: Analisis Peran Teknologi Informasi Audit Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Audit di Era Digital (Peluang dan Tantangan)," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2, no. 5, pp. 105–112, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489024>
- [6] R. D. P. & L. L. Ervian Ridho Mawlidyl, "Kemampuan Artificial Intelligence Terhadap Pendeteksian," *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol.*, vol. 7, no. 1, pp. 89–104, 2024.
- [7] B. Efflin Syahputra and Akhmad Afnan, "Pendeteksian Fraud: Peran Big Data dan Audit Forensik," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, vol. 12, no. 2, pp. 301–316, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.28939>
- [8] I. D. R. Suryani, E. Kurniawati, G. A. N. Wulan, and H. C. Dinniah, "Konseptualisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Praktik Audit Untuk Membantu Pengungkapan Fraud Di Indonesia," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, vol. 12, no. 2, pp. 138–156, 2021, doi: 10.18860/em.v12i2.12070.
- [9] Rizka Khoirotun Nisaa, Salsabila Maulidya Supriadi Bahrim, and Irda Agustin Kustiwi, "Digital Technology and Internal Transformation of Audits Against Financial Reporting Treatment: Literature Studies," *Journal of the Pearl of Accounting Science*, vol. 2, no. 2, pp. 263–277, 2024.
- [10] K. Khofifah, Nur Rahma Putri, Fitotul Jannah, and Nita Yuli Astuti, "Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, vol. 4, no. 2, pp. 218–223, 2024, doi: 10.69775/jpia.v4i2.215.
- [11] N. K. A. P. Kadek and Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, "Pengaruh Tekanan Finansial, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) dengan Integrasi Teknologi Sebagai Variabel Moderasi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Dawan," 2023. doi: 10.23887/vjra.v12i3.69063.
- [12] G. H. Ramadhan and H. N. L. Ernaya, "Accounting Student Research Journal," *Accounting Student Research Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 123–142, 2023.
- [13] A. Gunarsa, Latifah Sukmawatiy Yuniar, and Andi Ainil Mufida Tanra, "Efektivitas Metode Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud)," *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 5, no. 3, pp. 161–172, 2023, doi: 10.52005/aktiva.v5i3.206.
- [14] D. Rhamadhan, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Asuransi," *Lex LATA*, vol. 5, no. 1, pp. 104–113, 2023, doi: 10.28946/lexl.v5i1.1824.
- [15] Irsutami and A. Ryansyah, "Pengaruh Internal Audit dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kemampuan Deteksi Kecurangan (Fraud) pada Perguruan Tinggi Indonesia Irsutami 1* & Anggy Ryansyah 2 12 Politeknik Negeri Batam," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 114–121, 2023.
- [16] I. A. Akuba and Amiruddinn, "Audit Quality and Technology Factors in Auditing in the Digital Age: Faktor Kualitas Audit dan Teknologi dalam Audit di Era Digital," *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol. 26, no. 3, pp. 1–25, 2025, [Online]. Available: <https://ijins.umsida.ac.id/index.php/ijins/article/view/1470>
- [17] "Tingkatkan Efisiensi, Digitalisasi BPR/S Perlu Digenjot." [Online]. Available: <https://validnews.id/ekonomi/tingkatkan-efisiensi-digitalisasi-bprs-perlu-digenjot>
- [18] Nurdian Akhmad, "TOP Digital Awards 2023: BPR Delta Artha, Implementasi Beragam Solusi Digital Andalan Tanpa Lupakan Keamanan TI." [Online]. Available: <https://www.itworks.id/64261/top-digital-awards-2023-bpr-delta-artha-implementasi-beragam-solusi-digital-andalan-tanpa-lupakan-keamanan-ti.html>
- [19] K. Widhianti *et al.*, "Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia," *Rio Law Jurnal*, vol. 1, pp. 2025–2722, 2025, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- [20] A. S. Eko and D. Suwandi, "Dampak Transformasi Digital Terhadap Audit Intern , Manajemen Risiko , Dan Pengendalian : Tinjauan Literatur," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, vol. 5, no. 1, pp. 178–187, 2025.
- [21] R. Y. Averina and I. Gst. N. J. A. Widagda, "Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada Bank Perkreditan Rakyat," *Tjybjb.Ac.Cn*, vol. 27, no. 2, pp. 635–637, 2021.

- [22] C. A. R. Da Costa and S. Salim, "Independensi Auditor Dan Tantangan Etika Dalam Era Digitalisasi Audit," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 9, no. 2, pp. 2023–2036, 2025, doi: 10.31955/mea.v9i2.6050.
- [23] D. Yulia Gunita and I. D. Rahmawati, "Analysis of Company Internal Control in the Occurrence of Fraud at Delta Artha Sidoarjo People's Credit Bank (BPR). [Analisis Pengendalian Internal Perusahaan dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Sido," pp. 1–8.
- [24] B. P. Prtama and L. Purwati, "Analisis Deteksi Fraud dalam rangka Audit Investigatif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kota Malang," vol. 14, no. 2, pp. 156–175, 2025.
- [25] I. Nurbiati, K. Yunita, and E. Heniwati, "Whistleblower System untuk Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel di Desa Kayan Semapau Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi," *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 6, no. 3, pp. 1220–1229, 2025, doi: 10.38035/jafm.v6i3.2281.
- [26] D. Upaya and P. Fraud, "OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD," pp. 1–13, 2025.
- [27] Z. Yusuf, A. Nurwanah, and R. Sari, "Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi," *Owner*, vol. 6, no. 4, pp. 3653–3669, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i4.1115.
- [28] I Gusti Ayu Agung Omika DEWI, "Memahami Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Penelitian Akuntansi Interpretatif," *Journal of Tourism Economics and Policy*, vol. 1, no. 1, pp. 23–34, 2022.
- [29] E. L. Mustafidah, "Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian," *Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang*, no. 2012, pp. 23–31, 2023.
- [30] H. Permatasari and Gugus Irianto, "Implementasi Fraud Control Plan (Fcp) Untuk Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Xyz)," *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi*, vol. 2, no. 3, pp. 584–597, 2023, doi: 10.21776/reaksi.2023.2.3.194.
- [31] A. A. Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, vol. 12, no. 3, pp. 145–151, 2020, doi: 10.52022/jikm.v12i3.102.
- [32] Santi Kartika Sari, "PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI," 2021.
- [33] D. Susanto, Risnita, and M. S. Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 53–61, 2023, doi: 10.61104/jq.v1i1.60.
- [34] A. S. Sari, N. Aprisilia, and Y. Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5, no. 4, pp. 539–545, 2025, doi: 10.31004/irje.v5i4.3011.
- [35] D. Wibowo, "Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 1485–1491, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- [36] G. H. Ramadhan and H. N. L. Ernaya, "Accounting Student Research Journal," *Accounting Student Research Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 123–142, 2023.
- [37] R. Wulansari and Rr. S. Handayani, "Detecting Financial Statement Fraud Using Hexagon Theory: The Role of Effective Monitoring," *Jurnal Proaksi*, vol. 12, no. 2, pp. 138–155, 2025, doi: 10.32534/jpk.v12i2.6989.
- [38] D. Fitriyanto and Triyono, "Analysis of Financial Reporting Fraud with Fraud Hexagon Theory in Financial Companies in the Banking Sub-Sector in 2020-2022," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, vol. 13, no. 1, pp. 495–506, 2025, doi: 10.37641/jimkes.v13i1.3107.
- [39] U. Hasanah and R. A. Rahayu, "Accounting in the Management of Household Finance for Career Women in the Digital Financial Technology Era," pp. 1–13, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.21070/ups.4854>
- [40] I. I. J. Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "DETECTION OF FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT USING HEXAGON FRAUD THEORY A LITERATURE REVIEW," vol. 2, no. 1, pp. 306–312, 2024.
- [41] D. Fitriyanto and Triyono, "Analysis of Financial Reporting Fraud with Fraud Hexagon Theory in Financial Companies in the Banking Sub-Sector in 2020-2022," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, vol. 13, no. 1, pp. 495–506, 2025, doi: 10.37641/jimkes.v13i1.3107.
- [42] E. Putri Silmina, S. Sarmin, R. Umar, and H. Herman, "Meningkatkan Literasi Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Penipuan Online di Lingkungan PRA Ngadisuryan," *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, vol. 9, no. 2, pp. 322–330, 2025, doi: 10.37859/jpumri.v9i2.9860.
- [43] K. Nisa, O. Putri Handayani, and Setiawan, "Peningkatan Literasi Digital: Edukasi Kejahatan Siber Dan Pinjaman Online Illegal MAN 2 Cilacap," *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, vol. 4, no. 2, pp. 61–68, 2025, doi: 10.35960/pimas.v4i2.1831.
- [44] S. Harliani and F. Kurniawan, "Pengaruh Kemampuan Literasi Digital Terhadap Pencegahan Penipuan Online Pada Remaja Desa Saentis," *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, vol. 4, no. 4, pp. 2234–2248, 2025, doi: 10.56916/ejip.v4i4.2481.

- [45] T. Achmad, I. Ghozali, M. R. A. Helmina, D. I. Hapsari, and I. D. Pamungkas, "Detecting Fraudulent Financial Reporting Using the Fraud Hexagon Model: Evidence from the Banking Sector in Indonesia," *Economies*, vol. 11, no. 1, 2023, doi: 10.3390/economies11010005.
- [46] D. A. Hasna and N. Novianti, "The Effect of Hexagon Fraud Theory on Financial Statement Fraud with Audit Committee As a Moderating Variable," *Asia Pacific Fraud Journal*, vol. 9, no. 2, pp. 295–307, 2024, doi: 10.21532/apfjournal.v9i2.350.
- [47] A. Lutfi and I. Simpuluh, "Independensi, Teknologi Informasi Dan Skeptisisme Terhadap Fraud Detection Ability Auditor Internal Pemerintah Sulawesi Selatan," *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, vol. Vol 5, no. No 2, pp. 102–242, 2022.
- [48] A. Khaida Asaro, N. Sayidah, A. Assagaf, N. Marcelinno, S. Rohimah, and A. Jaapar, "Fraud Prevention and Detection Through Information Technology: From the Perspective of Internal Auditor's," *International Conference on Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 1, pp. 302–324, 2024.
- [49] S. Riadi, R. Ridwani, and P. N. Batam, "Fraud Detection : Dampak Kesiapan Teknologi , Teknik Auditor , Skill , Experience , Dan Independensi Auditor," *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, vol. 12, pp. 90–99, 2024.
- [50] Prima Dolorosa Seran, Sairun Simanullang, and Desyi Erawati, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Independensi Auditor terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan," *Jurnal Akuntan Publik*, vol. 2, no. 4, pp. 44–53, 2024, doi: 10.59581/jap-widyakarya.v2i4.4530.
- [51] N. Nautani, "The Influence of Auditor Quality, Professional Ethics and Internal Auditor Independence on Fraud Detection with Information Technology as a Moderating Variable," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 12, no. 5, pp. 623–640, 2024, doi: 10.37641/jiakes.v12i5.2849.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.